

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021-2023

Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB 26 Tahun 2020 Lampiran halaman 40)
Fenomena / Penyebab	Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 58,94 dengan kategori "CC".

MAKA

JIKA

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	
Indikator	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) (Penelitian"PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN [IKP] PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA oleh Rita Ariani dalam Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab Kukar Vol.12 No.1 Tahun 2018)
Fenomena / Penyebab	1. Belum optimalnya perencanaan yang ditunjukkan dengan : Nilai Variabel pada IRB : komponen pengungkit-hasil antara area perubahan masih rendah 5,17 (tahun 2020) dan 5,61 (Tahun 2021) Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemkab Lumajang Tahun 2020 dan 2021 pada komponen perencanaan kinerja belum optimal karena belum mencapai bobot maksimal dengan nilai 22,70 dan 22,83 (Penilaian KemenPAN RB Tahun 2020-2021)

MAKA

JIKA

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	
Indikator	1. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd (Permendagri 86 Tahun 2017 halaman 231 point 1.5) 2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbang (Permendagri 86 Tahun 2017 halaman 232 point 4.2)
Fenomena / Penyebab	1. Terdapat trend menurunnya Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 yaitu dari 100 % menjadi 85 % (LKJIP Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dan LPPD Kabupaten Lumajang Tahun 2021) 2. Capaian pemanfaatan hasil kelitbang Bappeda Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 menurut hasil evaluasi sebesar 100 % (LKJIP Kabupaten Lumajang Tahun 2021)

1. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Halaman 37 menyebutkan bahwa sub komponen kualitas perencanaan pada aspek hasil antara point g menentukan nilai Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Skema Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Halaman 37-38 pada sub komponen hasil point a sub komponen point b.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Halaman 37 menyebutkan bahwa sub komponen kualitas perencanaan pada aspek hasil antara point g menentukan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pasal 170 ayat 1 dan pasal 180
2. Menurut policybrief yang di susun oleh Siti Muawanah dan Umi Muzaynah dari Litbang Kemenag RI dan diterbitkan dalam <http://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/> pada tahun 2019 dengan judul "Penguatan Sosialisasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kepada Pemangku Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Agama", halaman 2 di sebutkan bahwa Kurang optimalnya Litbang memberikan dukungan terhadap kementerian diakui oleh Lakitan (2011:1) yang menyatakan bahwa citra litbang belum positif karena dianggap belum berhasil memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian mereka hanya menjadi laporan yang tertumpuk di rak perpustakaan (Kasanah, 2018) dan belum menjadi rujukan pembuatan kebijakan.

Penelitian"PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN [IKP] PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA oleh Rita Ariani dalam Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab Kukar Vol.12 No.1 Tahun 2018, menyatakan bahwa konsistensi dimensi proses dan isi serta keselarasan jaminan tindak lanjut berpengaruh pada kualitas perencanaan pembangunan